**Mata Kuliah : Analisa Politik Luar Negeri**

**Dosen : Andrias Darmayadi, Ph.D**

***LEVEL OF ANALYSIS***

*Level of Analysis dalam International Relationship:*

1. *International System: Global maupun Regional;*
2. *Group of States;*
3. *States;*
4. *Group/kelompok-kelompok, yang ruang lingkupnya lebih besar;*
5. *Individuals, sangat berpengaruh dalam suatu kegiatan.*

*Level of Analysis menurut K.J. Holsti:*

1. *International System;*
2. *States;*
3. *Individials.*

Prosedur dan Proses dari Politik Luar Negeri

Ada 6 (enam) pihak/lembaga/hal yang harus dilewati (dalam situasi eksternal dan internal yang normal), yaitu:

1. Keputusan final dari politik luar negeri ditetapkan/diputuskan/disosialisasikan oleh Kepala Negara dan Menteri Luar Negeri;
2. Namun rumusan tadi harus melalui persetujuan/pertimbangan dari lembaga pembuat UU/Lembaga Legislatif;
3. Keputusan itu sebelumnya diproses dan dirumuskan dalam lembaga-lembaga tatapraja/civil services (Deplu, Dephankam, Depdagri, Dep. Perdagangan);
4. Rumusan kebijakan tentu saja harus mempertimbangkan dan memperhitungkan public opinion/pendapat umum;
5. National Interest/kepentingan nasional dan National Values/nilai-nilai nasional dan kebangsaan merupakan sesuatu hal yang tidak saja berkaitan semata-mata dengan prestise atau reputasi nasional tetapi juga menyangkut identitas nasional, nasionalisme, ideology atau keyakinan-keyakinan dan filosofis bangsa tersebut;
6. Nilai-nilai dari pengaruh lingkungan (bersifat personal dan berasal dari luar/eksternal).

 Contoh: Nilai positif = situasi yang menguntungkan kepentingan nasional kita (peluang);

 Nilai negatif = situasi yang menghambat, misalnya kepentingan Indonesia bertentangan dengan kepentingan nasional Malaysia.

 Nilai dapat berubah tergantung dari kapabilitas suatu negara (kemampuan manajerial, kemampuan melihat peluang).

Dua penyebab dalam situasi kondusif yang menghalangi perkembangan politik luar negeri negara berkembang, yaitu:

1. Adanya kepentingan/strategi, bahkan dominasi dari negara-negara besar. Contoh: Indonesia tidak dikuasai secara fisik oleh Jepang atan tetapi secara ekonomi iya;
2. Muncul dari tidak solidnya organisasi yang mewadahi negara berkembang/organisasi regional yang berada di suatu kawasan. Contoh: ASEAN yang sedang tidak solid dengan alasan negara-negara anggota ASEAN telah ditinggalkan oleh negarawan-negarawan besar.

Ada 3 hal/persoalan yang harus diperhatikan ketika kita berniat menganalisis kebijakan/karakter suatu bangsa/negara:

1. Penentuan tujuan/orientasi serta perkiraan (estimasi) kegunaan dari analisis yang kita lakukan.
	1. Teoritis akademik
2. untuk lebih memahami teori/konsep mengenai suatu negara, kondisi, kecenderungan internasional dan sebagainya atau teori untuk lebih menguatkan dan mengembangkan teori/konsep tersebut;
3. untuk menguji suatu teori/konsep dalam lingkup dialektika keilmuan.
	1. Praktis/Pragmatis.
4. untuk kepentingan penentuan ataupun pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan negara/pemerintah;
5. untuk lebih mengenal karakteristik negara/bangsa tertentu, guna pendekatan lebih lanjut.

Dalam hal ini, konteks dari analisis kitapun diketemukan. Apakah dalam scope politik, ekonomi, sosial, budaya, ideologi, Hankam, ataukah militer ? Konteks itu bisa saja satu ataupun gabungan dari beberapa scope.

1. Sarana/perangkat Analisis;
	1. Metode apa yang digunakan ?
	2. Teori-teori atau konsep mana saja yang akan dipakai ?
	3. Pendekatan apa saja yang dipilih ?
	4. Dari disiplin apa saja alat/sarana pembantu yang dipergunakan, ekonomi, sosilogi atau hukum ?
2. Kategorisasi. Untuk membuat ketepatan analisis, diperlukan penentuan status/kelompok atau bisa jadi juga disebut jenis dari negara/bangsa yang akan dikaji.

Misal: dilihat dari status/standar ekonomi, maka kita bisa membedakan antara negara kaya, menengah dan miskin. Untuk penyebutan yang lain (dalam lingkup ekonomi/kesejahteraan) kita bisa kategorikan:

1. Negara-negara Utara dan Selatan;
2. Negara-negara industri maju dengan negara-negara berkembang dan *under developed.*

Ada juga penyebutan yang baur seperti dunia pertama, kedua dan ketiga. Orang-orang ekonomi menggunakannya untuk menyebut negara kaya, menengah dan miskin.

Orang sosialis/komunis (yang pertama menggunakan terminologi tersebut) memaksudkannya untuk menyebut tahapan negara menurut ideologi mereka. Lalu ada lagi sebutan Timur-Barat yang selain bermakna ideologis (Timur untuk sosialis/komunis dan Barat untuk liberal/kapitalis) juga bisa bermakna geografis (Barat menunjuk negara-negara Eropa dan Amerika, sedangkan Timur menunjuk Asia dan Timur Tengah).

Kategorisasi juga bisa dalam lingkup militer, keagamaan, etnis dan sebagainya.